



KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 100.3:3 / 3116 / satpol PP / IX / 2026
TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN DAFTAR INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SUMATERA UTARA

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Komisi Informasi Pasal 21 Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, bahwa setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang tersedia setiap saat yang didalamnya terdapat Daftar Informasi Publik;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 21 Ayat 2, setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang tersedia setiap saat yang didalamnya terdapat Daftar Informasi Publik yang memuat nomor, ringkasan isi informasi, pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi, penanggung jawab pembuatan atau penertiban informasi, waktu dan tempat pembuatan informasi, bentuk informasi yang tersedia, jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pendidikan tentang Penetapan Daftar Informasi Publik;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi

Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);

9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 9);
11. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/764/KPTS/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- PERTAMA** : Menetapkan Daftar Informasi Publik untuk diakses dan Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tersebut dalam lampiran.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Medan
PADA TANGGAL : 1 September 2026
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SUMATERA UTARA



Dr. MOETTAQIEN HASRIMI, S.STP., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA, (IV/c)
NIP. 198602072004121001

Lampiran I : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SUMATERA UTARA
 NOMOR : 100.3.3/3116/Satpol PP/IX/2026
 TANGGAL : 1 September 2026
 TENTANG : DAFTAR INFORMASI PUBLIK

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbit Informasi	Waktu dan Tempat, Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Informasi Wajib Diumumkan Secara Berkala	Informasi Wajib Diumumkan Serta Merta	Informasi Wajib Diumumkan Setiap Saat	Informasi Yang Dikecualikan	Jangka Waktu Atau Retensi Arsip
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara										
a	Sejarah	Informasi Ringkas sejarah Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Medan, Januari 2026	Softcopy, Online			✓		Selama Berlaku
b	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Medan, Maret 2026	Softcopy, Online			✓		Selama Berlaku
c	Daftar Nama Staf beserta Jabatan	Daftar Nama Staf beserta Jabatan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Medan, Januari 2026	Softcopy, Online			✓		Selama Berlaku
d	Tugas Pokok dan Fungsi	Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provsu	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Medan, Januari 2026	Softcopy, Online			✓		Selama Berlaku

e	Alamat Kantor	Informasi alamat dan nomor telepon Satuan Polisi Pamong Praja Provsu	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Medan, Januari 2026	Softcopy, Online			✓		Selama Berlaku
2	Program dan Kegiatan										
a	Rencana Strategis 2024 s/d 2026	Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provsu	Sub Bagian Keuangan	Sekretaris	Medan, Januari 2026	Softcopy, Online	✓		✓		Selama Berlaku
b	Rencana Kerja Tahun 2024 s/d 2026	Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provsu dari Tahun 2024 s/d 2026	Sub Bagian Keuangan	Sekretaris	Medan, Januari 2026	Softcopy, Online	✓		✓		Selama Berlaku
c	Rencana Program dan Kegiatan	Rencana Program Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provsu Tahun 2026	Sub Bagian Keuangan	Sekretaris	Medan, Januari 2026	Softcopy, Online	✓		✓		Selama Berlaku
d	LAKIP	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Provsu Tahun 2025	Sub Bagian Keuangan	Sekretaris	Medan, Januari 2026	Softcopy, Online	✓				Selama Berlaku

e	Perjanjian Kinerja	Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provsu dari Tahun 2025 s/d 2026	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Medan, Januari 2026	Softcopy, Online	✓				Selama Berlaku
f	Ringkasan RKA Tahun 2024 s/d 2025	Ringkasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja Provsu dari Tahun 2024 s/d 2025	Sub Bagian Keuangan	Sekretaris	Medan, Januari 2026	Softcopy, Online	✓				Selama Berlaku
g	Ringkasan DPA Tahun 2024 s/d 2025	Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Provsu dari Tahun 2024 s/d 2025	Sub Bagian Keuangan	Sekretaris	Medan, Januari 2026	Softcopy, Online	✓				Selama Berlaku
h	Galeri Foto dan Video	Galeri Foto dan Video Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provsu	Tim Media Satuan Polisi Pamong Praja Provsu	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Medan, Januari 2026	Softcopy, Online			✓		Selama Berlaku
i	Rilis Berita dan Kegiatan	Rilis Berita dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provsu	Tim Media Satuan Polisi Pamong Praja Provsu	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Medan, Januari 2026	Softcopy, Online			✓		Selama Berlaku

3	Laporan Keuangan										
a	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024 s/d 2025	Laporan Realisasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provsu Tahun 2024 s/d 2025	Sub Bagian Keuangan	Sekretaris	Medan, Januari 2026	Softcopy, Online	✓				Selama Berlaku
b	Daftar aset dan inventaris daerah Tahun 2024 s/d 2025	Daftar aset dan Inventaris Satuan Polisi Pamong Praja Provsu Tahun 2024 s/d 2025	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Medan, Januari 2026	Softcopy, Online	✓				Selama Berlaku

DITETAPKAN DI : Medan
PADA TANGGAL : 2026
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SUMATERA UTARA



Dr. MOETTAQIEN HASRIMI, S.STP., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA, (IV/c)
NIP. 19860207 200412 1 001

Lampiran II : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : 100-3.3/3116/satpol pp/IX/2026

TANGGAL : 1 September 2026

TENTANG : DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO	JENIS INFORMASI	ALASAN PENGECUALIAN (DASAR HUKUM)	JANGKA WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
Kepegawaian					
1	Data Pribadi Pegawai: • Daftar riwayat hidup pegawai • Hasil general chek up kesehatan pegawai • Hasil evaluasi kapabilitas/ intelektualitas/ kompetensi/ rekomendasi pegawai • Penilaian Prestasi Kerja Pegawai • Riwayat dan kondisi anggota keluarga pegawai • Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank pegawai • Catatan yang menyangkut pribadi seorang pegawai berkaitan dengan pendidikan formal dan non formal • Biodata Elektronik PNS (Database) • Berkas dan Arsip Dokumen PNS Provinsi dan Kabupaten/Kota • Dokumen Perceraian meliputi Identitas PNS yang mengajukan izin Perceraian/Perkawinan dan Dokumen Notulensi rapat Tim Penyelesaian Kasus Perceraian	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Sampai memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Melindungi hak pribadi
2	Penjatuhan Hukuman disiplin: • Surat panggilan atas dugaan pelanggaran disiplin pegawai • Surat perintah untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin pegawai • Berita acara pemeriksaan dugaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i bahwa dan j; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 23 huruf g;	Sampai memperoleh persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian dan Sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap	Bertentangan dengan praduga tak bersalah	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia

	pelanggaran disiplin di Dinas/Badan/Lembaga - Keputusan Hukuman Disiplin dari Pejabat Berwenang - Laporan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin dari Pejabat Berwenang - Berita acara beserta resume dan notulen sidang Tim Penyelesaian Kasus dugaan pelanggaran disiplin dari Badan Kepegawaian Provsu - Keputusan Hukuman Disiplin dari Badan Kepegawaian Provsu - Identitas pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin - Informasi lainnya terkait penjatuhan hukuman disiplin	Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 39 ayat (1) dan (2); Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 57			
3	Data usulan formasi dan daftar rencana penempatan CPNS berupa: - Data usulan penempatan - Data usulan pemindahan - Data usulan pengangkatan dan pemberhentian PNS dari jabatan struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum	Undang-Undang Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan i	Sampai memperoleh persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian dan Sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap	Akan menghambat proses penempatan, pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum	Mencegah Kolusi dan Menjaga iklim yang kondusif di lingkungan kerja
4	Naskah Soal dan Naskah Hasil Tes CPNS/Ujian Penyesuaian Ijazah dan kenaikan pangkat/ Ujian diklat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i	Sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap	Akan menimbulkan keresahan dan mengurangi keabsahan penilaian karena jawaban sudah dipersiapkan	Mencegah KKN
5	Data Pegawai yang masih dalam proses pengadilan sebagai saksi atau tersangka	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a dan huruf j; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

Keuangan dan Aset					
6	- Laporan Keuangan dan dokumen pendukung yang belum diaudit oleh BPK - Informasi tentang Wajib Pajak Daerah - Laporan Pajak Pribadi - Data Pihak Ketiga dalam SP2D	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah Pasal 172 ayat (1) dan (2); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 302 ayat (1) dan (2)	- Sampai mendapat persetujuan dan telah diundangkan dalam lembaran daerah - Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan selesainya proses pengadilan serta pemeriksaan keuangan oleh instansi yang berwenang	- Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara; - Apabila dibuka akan memberikan informasi yang tidak akurat;	- Melindungi dan megurangi penyalahgunaan dokumen negara; - Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi di mata publik;

DITETAPKAN DI : Medan
PADA TANGGAL : 2026
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SUMATERA UTARA



Dr. MOETTAQIEN HASRIMI, S.STP., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA, (IV/c)
NIP. 19860207 200412 1 001